



BerAKHLAK

orientasi Pelayanan | kuantabel | ompeter
harmoni |oyal |daptif |olaborasi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BERAU**


KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tanjung Redeb, 26 Februari 2024
Kepala BKPSDM Kabupaten Berau


Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 199403 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 yang diformulasikan dari hasil kinerja sub unit pelayanan administrasi perkantoran serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan atau bidang-bidang yang menjalankan fungsi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

LKj-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Bidang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini, memuat sasaran dan target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur.

LKj-IP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

kinerja, Plaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan juga mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2023 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 (tiga) program dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPSDM Kabupaten Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPSDM Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB
 3. Jumlah ASN yang mutasi
 4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi
 5. Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar
 6. Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan
 7. Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan
 8. Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
 9. Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional
 10. Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM
- Sasaran II : Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah PNS yang memenuhi syarat administrasi tanda kehormatan
 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN

3. Jumlah SK hukuman ASN
 4. Jumlah usulan ijin perceraian sesuai PP no.10 Tahun 1983
 5. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin
- Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun
 2. Tersedianya data Kepegawaian Yang Akurat
 3. Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen di Lingkungan Pemkab. Berau
 4. Jumlah ASN yang diproses kenaikan pangkatnya

Dari ketiga sasaran strategis tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0.59	0.15	25,42	489.979.000	486.918.422	95,29
		86.69	115.60	133,35	6.297.742.00	4.721.924.642	74,98
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,3	0,3	0,3	115.000.000	106.221.796	92,37
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	104,80	116,44	125.250.000	114.758.573	91,62

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 mencapai 84 ,73 % atau sebesar Rp 16.358.548.636,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 19.305.965.831,-

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Berau

Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 1965112 1994 03 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategi Organisasi	5
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
G. Sarana dan Prasarana Kerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja	14
1. Rencana Anggaran Tahun 2023	15
2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..	15
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Analisis Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel I.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau	3
Tabel I.2	Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2023	4
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau	7
Tabel II.1	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	9
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	9
Tabel II.3	Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program BKPSDM Tahun 2021-2026	11
Tabel II.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja	14
Tabel II.6	Target Belanja	15
Tabel II.7	Anggaran per Sasaran Strategis	16
Tabel III.1	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	17
Tabel III.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran I)	21
Tabel III.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran II)	21
Tabel III.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran III)	22
Tabel III.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran I)	22
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran II)	23
Tabel III.7	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran III)	23
Tabel III.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran I)	24
Tabel III.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran II)	24
Tabel III.10	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran III)	25
Tabel III.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel III.12	Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
Tabel III.13	Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2023	31
Tabel III.14	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2023	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2023
- Lampiran 2 Realisasi Perjanjian Kinerja Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2023
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2023
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
- Lampiran 5 Rencana Aksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2023
- Lampiran 6 Realisasi Rencana Aksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau.

B. Tugas dan Fungsi

Terkait tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagai instansi yang melaksanakan manajemen kepegawaian, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya aparatur dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Berau “Mewujudkan Berau Sejahtera, unggul, dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungannya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau terdiri dari :

D. Sumber Daya Aparatur

Tabel I.2
Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		1	1				1					
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	2	1	2	1			2	1				
Kepala Sub Bagian	1	1	1	1			1	1				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	4	3		7				6	1			
Penelaah Teknis Kebijakan	8	7		15			1	14				
Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1		2				1	1			
Pengadministrasian Perkantoran	5	2		4	3					7		
Analisis Permasalahan Hukum	1			1				1				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		1		1				1				
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1		2				2				
Jumlah PNS	23	19	5	34	3		6	27	2	7		
Jumlah PPPK	2	1						3				
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)	8	3						6		5		
Jumlah PNS + PPPK + PTT	33	23	5	34	3		6	36	2	12		

Dari tabel diatas, jumlah Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan 23 orang. Berdasarkan golongan/ruang, golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 34 orang dan golongan II sebanyak 3 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari SLTA sebanyak 12 orang.

Diploma sebanyak 2 orang, Sarjana sebanyak 36 Orang dan Pasca Sarjana sebanyak 6 orang

E. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 adalah:

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau memiliki fokus pencapaian pada misi ke empat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 terkait dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yaitu :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Tersedianya jaringan informasi data;

3. Adanya kerjasama antar daerah, provinsi, kabupaten/kota, atau dengan instansi lain yang mendukung pelaksanaan program kerja BKPSDM.;
4. Adanya Komitmen Bupati untuk pengembangan SDM secara menyeluruh;

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Visi dan Misi Kabupaten Berau yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis dalam perumusan kebijakan kepegawaian daerah
 - Standar Pelayanan Kepegawaian
2. Isu strategis dalam pemberian dukungan terhadap kebijakan kepegawaian
3. Isu strategis bidang mutasi pegawai :
 - a. perencanaan mutasi umum pegawai yang tepat guna dan konsisten dalam pelaksanaannya.
 - b. Penyusunan perencanaan pengadaan pegawai yang berkualitas dan komprehensif Kemampuan mewujudkan penataan dan penempatan PNS dalam jabatan
4. Isu strategis bidang pengembangan pegawai :
 - a. Kemampuan peran BKPSDM dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karier pegawai dan peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
 - b. Dapat menciptakan tenaga kepegawaian yang profesional
 - c. Pemantapan sosialisasi, diklat dan bimtek untuk meningkatkan mutu PNS
5. Isu strategis bidang pembinaan :

- a. Penguatan kerjasama lembaga
 - b. Mewujudkan kesejahteraan PNS
 - c. Meningkatkan disiplin PNS
 - d. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi
- G. Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2400	m2
2	Gedung	2400	m2
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Line
6	Internet	2	Jaringan
7	Area Parkir	2	Area
8	Ruangan	17	Ruangan

**BAB II
PERENCANAAN
KINERJA**

A. Perencanaan Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan manifestasi komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Tabel II. 1
isi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau
Tahun 2021-2026

VISI	MISI
Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau bertujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi. Dengan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

2. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

3. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	78,59	82,63	86,69	90,74	94,79	98,84
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	%	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	%	90	90	90	90	90	90	

3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang difokuskan

pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel II.3
Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SOM Aparatur	Pendayagunaan dan pengembangan ASN yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan formal sesuai kebutuhan	Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar
	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Penyelenggaraan pengembangan ASN berdasarkan merit system yang didukung pola karier yang jelas	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan didasarkan prioritas kebutuhan organisasi dan hasil kebutuhan pelatihan
			Pemeriksaan pelanggaran disiplin
			Penetapan keputusan Hukuman Disiplin
Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Penyelenggaraan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian melalui penguatan data base pegawai yang up to date	Kompilasi Dokumen Kepegawaian	

Proses Perencanaan Strategis adalah Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
 - 1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 1.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.

Pendidikan dan pelatihan

4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi

Tabel II.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	%	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiun -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun lalu	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja (PK)
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,59
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	86,69
2	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,3
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	8.280.762.151,-
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	295.590.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.483.095.151,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	37.500.000,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	409.086.000,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	491.000.000,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	399.491.000,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	165.000.000,-
B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	4.727.461.680,-
8.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Rp	923.848.080,-
9.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp	1.631.799.000,-
10.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	1.570.928.000,-
11.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	600.886.600,-
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	6.297.742.000,-
12.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	6.297.742.000,-

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 14.702.587.889,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 19.305.965.831,- dengan rincian Belanja Langsung Rp Rp 13.998.669.720,-, Belanja Tidak Langsung Rp 5.307.296.111,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 16.354.953.982,- (84,73%).

2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau

Tabel II.6
Target Belanja
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	13.998.669.720,-	11.648.300.654,-	83,21
2	Belanja Tidak Langsung	5.307.296.111,-	4.706.652.982,-	88,68
	Jumlah	19.305.965.831,-	16.354.953.982,-	

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
Anggaran per Sasaran Strategis
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	9.918.272.000,-	7.821.605.197,-	78.86
2.	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	600.886.600,-	570.308.273,-	94.91
3.	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	506.045.080,-	470.197.464,-	92.92

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis

Laporan Akuntabilitas menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan, capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III.1
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	TW I			
					TW II	1	1	100
					TWIII			
					TW IV			
	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB	Formasi	1315	TW I	200	200	100	
				TW II	521	521	100	
				TWIII	446	446	100	

				TW IV	148	148	100
Jumlah ASN yang mutasi	Orang	738	TW I	30	30	100	
			TW II	129	129	100	
			TWIII	437	437	100	
			TW IV	142	142	100	
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi	Jabatan	9	TW I				
			TW II	2	2	100	
			TWIII	1	1	100	
			TW IV	6	6	100	
Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan izin Belajar dan Tugas Belajar	Orang	20	TW I	5	0	0	
			TW II	5	4	80	
			TWIII	5	3	60	
			TW IV	5	0	0	
Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan	Kali	30	TW I	3	3	100	
			TW II	6	6	100	
			TWIII	4	4	100	
			TW IV	17	17	100	
Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan	Kali	20	TW I	5	5	100	
			TW II	6	6	100	
			TWIII	1	1	100	
			TW IV	8	8	100	
Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau	Orang	30	TW I				
			TW II	30	32	107	
			TWIII				
			TW IV				
Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	Orang	532	TW I				
			TW II				
			TWIII				
			TW IV	532	532	100	

		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	993	TW I	200	170	85
					TW II	550	475	86
					TWIII	43	36	84
					TW IV	200	150	75
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Jumlah PNS Yang Mengusulkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Orang	200	TW I	55	54	98
					TW II	55	61	111
					TWIII	90	97	108
					TW IV			
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN	PD	47	TW I			
					TW II			
					TWIII			
					TW IV			
		Jumlah SK hukuman ASN	SK	21	TW I	11	3	27
					TW II	10	1	10
					TWIII			
					TW IV			
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	TW I	5	5	100
					TW II	3	2	67
					TWIII	2	2	100
					TW IV	5	4	80
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin	Dokumen	47	TW I					
			TW II	1	1	100		
			TWIII					
			TW IV	46	46	100		
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	Orang	170	TW I	65	64	98
					TW II	25	20	80
					TWIII	65	60	92
					TW IV	15	11	73
		Terinputnya semua	Orang	4700	TW I	1125	1200	107

	Data PNS, Terdokumentasinya Arsip Fisik Kepegawaian			TW II	1125	1200	107
				TWIII	1125	1173	104
				TW IV	1125	1143	102
	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen	Orang	160	TW I	40	0	0
				TW II	40	10	25
				TWIII	40	0	0
				TW IV	40	17	43
	Terselesaikannya usulan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional	Berkas	2180	TW I	649	649	100
				TW II	299	299	100
				TWIII	450	450	100
				TW IV	782	782	100

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi				Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.280.762.151	1.232.050.955	2.576.960.193	1.522.035.919	2.165.390.635	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.272.461.680	320.125.456	647.135.516	1.006.500.450	2.166.424.870	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.297.742.000	320.670.499	1.390.142.419	932.783.907	2.078.327.817	

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100
2.	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB	Formasi	1315	1315	100
3.	Jumlah ASN yang mutasi	Orang	738	738	100
4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi	Jabatan	9	9	100
5.	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Orang	20	7	35
6.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan	Kali	30	30	100
7.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan	Kali	20	20	100
8.	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau	Orang	30	32	107
9.	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	Orang	532	532	100
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	993	831	84

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.3
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS Yang Mengusulkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Orang	200	212	106
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN	Perangkat Daerah	47	47	100
3.	Jumlah SK hukuman ASN	SK	21	4	19
4.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Surat Izin	15	13	87
5.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin	Dokumen	47	47	100

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	Orang	170	155	91
2.	Terinputnya semua Data PNS, Terdokumentasinya Arsip Fisik Kepegawaian	Orang	4700	4716	100,34
3.	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen	Orang	160	27	17
4.	Terselesainya usulan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional	Berkas	2180	2180	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.5
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	0	1	Peningkatan 100%
2.	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB	Formasi	1073	1315	Peningkatan 23%
3.	Jumlah ASN yang mutasi	Orang	323	738	Peningkatan 128%
4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi	Jabatan	6	9	Peningkatan 50%
5.	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Orang	8	7	Penurunan 12,5%
6.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan	Kali	21	30	Peningkatan 43%
7.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan	Kali	30	20	Penurunan 33%
8.	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau	Orang	30	32	Peningkatan 7%
9.	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	Orang	0	532	Peningkatan 100%
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	553	831	Peningkatan 50%

Sasaran 2 : Meningkatkan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.6

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS Yang Mengusulkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Orang	150	212	Peningkatan 41%
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN	Perangkat Daerah	47	47	
3.	Jumlah SK hukuman ASN	SK	13	4	Peningkatan 69%
4.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Surat Izin	11	13	Penurunan 18%
5.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin	Dokumen	0	47	Peningkatan 100%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.7

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	Orang	154	155	
2.	Terinputnya semua Data PNS. Terdokumentasinya Arsip Fisik Kepegawaian	Orang	4901	4716	Penurunan 96%
3.	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen	Orang	508	27	Penurunan 95%
4.	Terselesaikannya usulan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional	Berkas	1537	2180	Peningkatan 42%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.8

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100%
2.	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB	Formasi	500	1315	263%
3.	Jumlah ASN yang mutasi	Orang	500	738	148%
4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi	Jabatan	4	9	225%
5.	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Orang	25	7	28%
6.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan	Kali	89	30	34%
7.	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan	Kali	30	20	67%
8.	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau	Orang	30	32	107%
9.	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	Orang	60	532	887%
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	1000	831	83%

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.9

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS Yang Mengusulkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Orang	250	212	85%
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN	Perangkat Daerah	47	47	100%
3.	Jumlah SK hukuman ASN	SK	12	4	33%
4.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Surat Izin	7	13	186%
5.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin	Dokumen	-	47	100%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.10
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	Orang	155	155	100%
2.	Terinputnya semua Data PNS, Terdokumentasinya Arsip Fisik Kepegawaian	Orang	6000	4716	79%
3.	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen	Orang	250	27	11%
4.	Terselesainya usulan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional	Berkas	900	2180	242%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB
 3. Jumlah ASN yang mutasi
 4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi
 5. Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar
 6. Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan
 7. Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan

8. Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
9. Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional
10. Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM

Dari sasaran 1 di atas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar dan Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal :

1. Belum dimilikinya dokumen rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Program Studi pendidikan lanjutan tidak sesuai dengan rumpun jabatan yang diampu oleh pemohon tugas belajar.
3. Masih adanya intervensi dari pihak tidak berwenang dalam pemberian penugasan tugas belajar pembiayaan APBD.
4. Kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil tentang Tugas Belajar.
5. Penugasan tugas belajar yang pembiayaan berasal dari daerah hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
6. Terkait dengan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih belum memiliki dasar hukum aturan yang mengaturnya.
7. Dikarenakan untuk kegiatan diklat harus memenuhi 3 unsur yaitu : kesiapan peserta dan kesiapan penyelenggara, yaitu terkait narasumber dan jadwal kegiatan. kegiatan yang sudah direncanakan mendadak diubah oleh penyelenggara sehingga peserta tidak siap pada jadwal yang telah diubah tersebut, dan narasumber atau pengajar memiliki jadwal yang padat sehingga tidak sinkron dengan jadwal Pemerintah

Kabupaten Berau. Contoh : Diklat Pranata Komputer, Diklat Untuk Jafung Analis Kepegawaian, Diklat Legal Drafting, Diklat PUPR.

Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, yaitu :

1. Membuat dokumen rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil selama 4 tahun.
 2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi agar dapat menambah referensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan peningkatan pendidikan sesuai dengan jabatan yang diampunya.
 3. Membuat regulasi yang jelas terkait pendanaan tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mulai dari kriteria penerima, jumlah dana sampai dengan komponen-komponen pembiayaan.
 4. Melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang tugas belajar melalui berbagai media.
 5. Dapat dilakukan peninjauan terkait sumber pembiayaan tugas belajar dari daerah selain dana APBD misal dana BLUD Rumah Sakit, dll.
 6. Terkait dengan Peningkatan pendidikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka perlu dibuat Surat Edaran yang menjadi pedoman terkait diperbolehkan atau tidaknya untuk melanjutkan studi.
 7. Mengupayakan kesiapan peserta jika ada perubahan dari pihak penyelenggara, mencari alternatif narasumber dari lembaga lain yang memenuhi kompetensi penyelenggaraan diklat meningkatkan koordinasi jauh hari agar Pemerintah Kabupaten Berau mendapatkan prioritas fasilitasi diklat dari pihak ketiga.
- Sasaran II : Meningkatkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
1. Jumlah PNS yang memenuhi syarat administrasi tanda kehormatan
 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN

3. Jumlah SK hukuman ASN
4. Jumlah usulan ijin perceraian sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983
5. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin

Dari sasaran II tersebut semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat 2 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah SK hukuman ASN dan Jumlah Usulan ijin perceraian sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983, yang menggunakan rumus semakin rendah realisasi semakin tinggi kinerjanya.

- Sasaran III : Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun
 2. Tersedianya data Kepegawaian Yang Akurat
 3. Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
 4. Jumlah ASN yang diproses kenaikan pangkatnya

Dari sasaran III tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan target 160 orang adalah jumlah orang mengurus Kartu TASPEN, KARPEG/ Kartu ASN Virtual, KARIS dan KARSU. Sebagaimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kartu ASN Virtual, bahwa Kartu ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh ASN melalui SIASN, demikian juga untuk pengusulan Kartu TASPEN tidak lagi melalui BKPSDM Kabupaten Berau sesuai surat PT Taspem (Persero) Cabang Samarinda Nomor : SRT-483/C.1.9/122022 tentang penutupan Aplikasi e-klaim, sehingga realisasi hanya 27 orang yang melakukan pengusulan KARIS dan KARSU.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur			
1.1	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100	99,93	0,07
1.2	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB	100	99,98	0,02
1.3	Jumlah ASN yang mutasi	100	85,74	14,26
1.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Seleksi	100	95,36	4,64
1.5	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan Izin Belajar dan Tugas Belajar	35	95,29	4,71
1.6	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan	100	66,91	33,09
1.7	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional yang dilaksanakan	100	44,51	55,49
1.8	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau	106,67	97,91	2,09
1.9	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	100	69,76	30,24
1.10	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	83,69	74,98	25,02
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau			
2.1	Jumlah PNS Yang Mengusulkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	106	96,72	3,28
2.2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan disiplin ASN	100	94,54	5,46
2.3	Jumlah SK hukuman ASN	19,05	92,37	7,63
2.4	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	86,67	95,72	4,28
2.5	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin	100	89,76	10,24
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian			
3.1	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	91,18	85,67	14,33
3.2	Terinputnya semua Data PNS, Terdokumentasinya Arsip Fisik Kepegawaian	100,34	91,62	8,38
3.3	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen	16,88	87,57	12,43
3.4	Terselesainya usulan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional	100	99,56	0,44

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target kinerja, berikut adalah penyajian data program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.12
Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,59	0,15	25,42	
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional		86,69	115,60	133,35
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				
			Pengelolaan Mutasi ASN				
			Pengelolaan Promosi ASN				
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				
			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.						
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN		0,3	0,3	100	
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				
			Pembinaan Disiplin ASN				
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				
	Evaluasi Pembinaan Disiplin						
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan		90	100,34	116,44	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
			Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel III.13
Realisasi Anggaran BPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0,59	0,15	25,42	489.979.000	486.918.422	95,29
		86,69	115,60	133,35	6.297.742.000	4.721.924.642	74,98
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,3	0,3	0,3	115.000.000	106.221.796	92,37
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	104,80	116,44	125.250.000	114.758.573	91,62

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Tabel III.14
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.280.762.151,-	7.496.437.702,-	90,53	
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	295.590.000,-	225.520.800,-	76,30	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.483.095.151,-	5.867.894.582,-	90,51	
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	37.500.000,-	32.250.000,-	86,00	
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	409.086.000,-	387.396.603,-	94,70	
1.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	491.000.000,-	443.310.627,-	90,29	
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	399.491.000,-	382.858.565,-	95,84	
1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	165.000.000,-	157.206.525,-	95,28	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.272.461.680,-	4.140.186.292,-	87,58	
2.1	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	923.848.080,-	888.684.454,-	96,19	
2.2	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	1.631.799.000,-	1.537.416.572,-	94,22	
2.3	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	1.570.928.000,-	1.143.776.993,-	72,81	
2.4	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	600.886.600,-	570.308.273,-	94,91	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.297.742.000,-	4.721.924.642,-	74,98	
3.1	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	6.297.742.000,-	4.721.924.642,-	74,98	

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 mencapai 84,73 % atau sebesar Rp 16.358.548.636,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 19.305.965.831,-

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 melalui bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilakukan sebagai upaya pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 :

- Pelaksanaan Uji Kompetensi / Virtual Assesment bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau





- Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2023



- Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau



- Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama





- Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Aplikasi E-Kinerja





- Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepegawaian




- Layanan Kepegawaian



- Studi Tiru BKPSDM Kabupaten Berau terkait Implementasi Sistem Merit di BKPSDM Kabupaten Kutai Timur







BAB IV
PENUTUP


Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kepegawaian yang melibatkan stakeholders, sehingga tercipta pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sebagai wujud upaya penguatan akuntabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi. Untuk itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Berau



Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 1965112 1994 03 2 008

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M**

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BERAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. SRI JUNIARSIH. MAS, M.Pd**

Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian dari perjanjian

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dapat menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu wujud dan pertanggung jawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

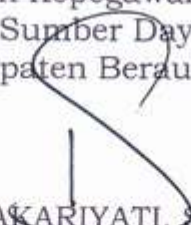
Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat, serta untuk mewujudkan VISI dan MISI Bupati melalui perumusan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 :

**“MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN
BERAU YANG KOMPETEN, BERDAYA SAING, PROFESIONAL DAN
BERINTEGRITAS TINGGI”**

Demikian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini kami susun semoga memberikan manfaat, apabila dalam penyusunan ini ada kesalahan maupun kekurangan mohon, tanggapan, saran dan masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Berau


Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196512121994032008

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,69
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional	90,74
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,29
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90

PROGRAM	ANGGARAN
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.978.353.416
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 666.637.400
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.508.523.016
3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 104.750.000
4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 282.107.200
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 108.826.400
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 162.501.400
7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 145.008.000
B PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 3.871.972.600
8 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 679.998.000
9 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp 799.999.000
10 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 1.376.975.600
11 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 1.015.000.000
C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 5.823.429.000
12 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp 999.989.000
13 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 4.823.440.000
Jumlah	Rp 18.673.755.016

Tanjung Redeh, 8 Januari 2024
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau

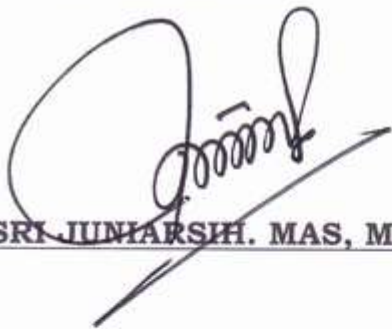
Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651212 199403 2 008

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI BERAU



HJ. SRI JUNIARSH. MAS, M.Pd

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BERAU**



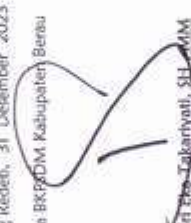
Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 199403 2 008

	Jumlah unjukan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspin	Orang	160	Triwulan I	40	0	
				Triwulan II	40	10	25
				Triwulan III	40		0
				Triwulan IV	40	17	43
		Bebas	2180	649	649	100	
	Terselenggarakannya unjukan kenaikan pangkat ASN, Pencantuman Celar, Peninjauan Masa Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Fungsional.			299	299	100	
				450	450	100	
				782	782	100	

NO	Program	Anggaran	Realisasi				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	2		4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.280.762.151	1.232.050.955	2.576.960.193	1.522.035.919	2.165.390.635	
2	PROGRAM KEPECAWAHAN DAERAH	Rp 4.727.461.680,00	320.125.456	647.135.516	1.006.500.450	2.166.424.870	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.	Rp 6.297.742.000,00	320.670.499	1.390.142.419	932.783.907	2.078.327.817	

Tanjung Redeh, 31 Desember 2023

Kepala BKPPDM Kabupaten Berau



HJ. Sri Pertiwi Takarhyati, SH, MAM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199403 2 008

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023					
		Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3																		
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	50	399.491.000	3	75.697.543	-	93.193.216	-	67.972.556	-	145.995.250	-	382.658.965	-	-	-	-	-	-
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	3.000.000	3	125.000	2	75.500	15	440.000	2	440.000	22	1.080.500	44,00	36,02				
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	110.000.000	3	28.048.123	3	27.355.166	3	20.319.136	2	28.574.470	11	104.296.885	91,67	94,82				
03	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor	112	11.500.000	56	1.100.000	56	1.500.000	-	3.000.000	-	2.990.000	112	8.690.000	100,00	74,70				
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	274.991.000	5	46.424.420	-	64.262.560	-	44.213.420	-	113.990.780	5	268.891.180	100,00	97,78				
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	165.000.000	8	14.419.000	8	17.697.900	-	13.727.500	-	31.114.534	16	76.958.934	100,00	96,20				
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	80.000.000	8	14.419.000	8	17.697.900	-	13.727.500	-	31.114.534	16	76.958.934	100,00	96,20				
09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	80.247.591	14	80.247.591	35,00	94,41			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	4.727.461.680	-	320.125.456	-	647.135.516	-	1.006.500.450	-	2.168.424.870	-	4.140.186.292	85,99	88,19				
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	1	923.848.080	1	159.533.960	1	115.191.783	-	175.079.064	-	438.880.237	-	888.684.454	96,19	96,19				
02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	92.999.000	1	5.705.000	1	14.170.000	-	31.782.500	-	41.279.000	1	92.936.500	100,00	99,93				
03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK	1315	523.480.000	200	108.416.324	521	72.777.603	446	96.747.901	168	245.415.144	1.315	523.366.872	100,00	99,98				
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170	97.120.000	64	15.357.460	20	4.911.607	60	9.823.541	11	53.107.751	155	83.200.359	91,16	85,67				
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	4700	125.250.000	1.200	15.555.230	1.200	11.787.050	1.173	25.662.040	1.143	61.754.243	4.716	114.758.573	100,34	91,62				
11	Pengelolaan Data Kepegawain	160	84.999.080	-	13.499.946	10	11.545.033	-	12.063.072	17	37.324.059	27	74.432.150	16,88	87,57				
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	1.631.799.000	-	77.092.556	-	155.883.920	-	523.657.137	-	780.782.965	-	1.537.416.572	-	-				
01	Pengelolaan Mutasi ASN	738	280.640.000	30	30.771.540	129	32.892.000	437	51.369.130	142	125.597.922	738	240.630.582	100,00	85,74				
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2180	198.676.000	649	21.024.094	299	37.407.950	450	64.396.462	782	74.977.876	2.180	197.806.382	100,00	99,56				
03	Pengelolaan Promosi ASN	9	1.152.463.000	-	25.296.522	2	85.583.970	1	407.891.539	6	580.207.167	9	1.098.979.589	100,00	95,36				
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	1.570.928.000	-	52.586.500	-	240.726.926	-	206.328.982	-	644.134.595	-	1.143.776.993	-	-				
04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20	489.979.000	-	-	4	164.062.800	3	167.731.064	-	115.104.559	7	466.918.422	35,00	95,29				
05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	30	230.000.000	3	30.223.040	6	12.875.200	4	27.696.416	17	83.106.905	30	153.900.561	100,00	66,91				
09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	20	279.928.000	5	22.363.460	6	43.768.926	1	10.902.502	1	47.570.831	20	124.605.719	100,00	44,51				

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023					
		I			II			III			IV			7			12		13			
		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.			
2	3																					
14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	532	571.029.000	-	-	-	-	-	-	532	398.352.291	-	532	398.352.291	532	398.352.291	100,00	69,76				
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		600.886.600	30.912.440	135.333.477	101.435.273	302.627.083	570.308.273														
02	Peaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30	135.000.000	12.403.160	69.884.000	17.886.100	32.006.530	132.179.790														
06	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	200	100.000.000	-	61	6.900.000	35.961.758	96.720.400														
07	Pembinaan Disiplin ASN	47	130.433.600	-	-	8.797.583	-	123.308.821														
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	21	115.000.000	-	1	26.215.894	25.110.429	106.221.796														
09	Pelaksanaan Proses Izin Pencaraian Pegawai	15	63.031.000	5.860.000	2	10.776.000	13.750.996	60.335.986														
10	Evaluasi Disiplin ASN	47	57.422.000	12.649.280	1	11.760.000	8.686.000	51.541.480														
5 03 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		6.297.742.000	320.670.499	1.390.142.419	932.783.907	2.078.327.817	4.721.924.642														
5 03 02 2.01	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		6.297.742.000	320.670.499	1.390.142.419	932.783.907	2.078.327.817	4.721.924.642														
07	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	983	6.297.742.000	320.670.499	475	1.390.142.419	932.783.907	4.721.924.642														
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		19.305.985.831	1.872.846.910	4.614.238.128	3.461.320.276	6.410.143.322	16.358.548.636														

Tanjung Redab, 31 Januari 2024

KEPALA BKPSDM KABUPATEN BERAU

HI. SRI EKA T. KARIYATI, SH., M.M.

Seabina Utama Murak

NIP. 19651212 199403 2 008

Lampiran

Keputusan Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Nomor : 1221 Tahun 2021

Tanggal : 11 Nopember 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021-2026**

Instansi :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

Tugas :

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTB;
6. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
					2021	2022	2023	2024	2025			2026
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	3 Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	4 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/jjin belajarX 100 Jumlah ASN	6 0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	8 Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/jjin belajar	9 Bidang Pengembangan Aparatur
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiunX 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	78,5	82,6	86,6	90,7	94,7	98,8	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	Bidang Pengembangan Aparatur
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu - Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini)X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun lalu	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Aparatur
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Jumlah data ASN yang diupdateX 100 Jumlah ASN	90	90	90	90	90	90	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Mutasi Aparatur

Tanjung Redeb, 11 Nopember 2021
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau

MUHAMMAD SAID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19790723 200212 1 001

**RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BERAU TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis			Program dan Kegiatan/sub Kegiatan						Anggaran Program dan Kegiatan				Target				Penanggung jawab
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Uraian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target		Anggaran Program dan Kegiatan	Target		Penanggung jawab					
								Triwulan (Tw)	TARGET		Triwulan (Tw)	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						PROGRAM PELUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Dokumen	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	3 0 0 3	Rp 25.000.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ibtisaf/Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Dokumen	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	3 3 3 4	Rp 10.000.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Bulan	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	5 5 5 5	Rp 93.200.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 33.280.000 24.960.000 16.640.000 8.320.000	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Tahun	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	3 3 3 3	Rp 4.312.693.849	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 1.725.157.540 1.293.868.155 862.578.770 431.289.385	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			
							Penyediaan Administrasi Pebaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	27 0 0 0	Rp 932.687.040	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 373.074.816 279.806.112 186.537.408 93.268.704	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pungutan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Bulan	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	3 3 3 3	Rp 181.692.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 72.676.800 54.507.600 36.338.400 18.169.200	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
							Pengadaan Pablin Disas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Staf	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	0 50 0 0	Rp 37.600.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp - 42.500.000 - -	Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	Tw 1	2		Tw 1	Rp	1.596.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	2	Rp	4.950.000	Tw 2	Rp		1.497.000
				Tw 3	2			Tw 3	Rp		588.000
				Tw 4	1			Tw 4	Rp		499.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	Tw 1	7		Tw 1	Rp	41.598.800	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	8	Rp	104.567.000	Tw 2	Rp		31.499.100
				Tw 3	8			Tw 3	Rp		20.999.400
				Tw 4	2			Tw 4	Rp		10.499.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	Tw 1	5		Tw 1	Rp	1.439.600	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	0	Rp	3.599.000	Tw 2	Rp		1.079.700
				Tw 3	0			Tw 3	Rp		719.800
				Tw 4	0			Tw 4	Rp		359.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kali	Tw 1	6		Tw 1	Rp	13.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	8	Rp	32.500.000	Tw 2	Rp		9.750.000
				Tw 3	6			Tw 3	Rp		6.300.000
				Tw 4	6			Tw 4	Rp		3.250.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	Tw 1	1		Tw 1	Rp	2.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset		
			Tw 2	2	Rp	5.000.000	Tw 2	Rp		1.500.000	
			Tw 3	2			Tw 3	Rp		1.000.000	
			Tw 4	2			Tw 4	Rp		500.000	
Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Paundang-undangan	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	Tw 1	2		Tw 1	Rp	1.200.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset		
			Tw 2	0	Rp	3.000.000	Tw 2	Rp		900.000	
			Tw 3	0			Tw 3	Rp		600.000	
			Tw 4	0			Tw 4	Rp		300.000	
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kali	Tw 1	8		Tw 1	Rp	44.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset		
			Tw 2	6	Rp	110.000.000	Tw 2	Rp		33.000.000	
			Tw 3	7			Tw 3	Rp		22.600.000	
			Tw 4	6			Tw 4	Rp		11.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dina Peronangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Unit	Tw 1	3		Tw 1	Rp	8.400.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	0	Rp	21.000.000	Tw 2	Rp		6.300.000
				Tw 3	0			Tw 3	Rp		4.200.000
				Tw 4	0			Tw 4	Rp		2.100.000
	Pengadaan Mebel	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Unit	Tw 1	5		Tw 1	Rp	12.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	0	Rp	30.000.000	Tw 2	Rp		9.000.000
				Tw 3	0			Tw 3	Rp		6.000.000
				Tw 4	0			Tw 4	Rp		3.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pembelian Perangkit Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Unit	Tw 1	0		Tw 1	Idr	20.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
				Tw 2	2	Rp	50.000.000	Tw 2	Rp		15.000.000
				Tw 3	0			Tw 3	Rp		10.000.000
				Tw 4	0			Tw 4	Rp		5.000.000

1	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/ terbaharui	Orang	Tw 1	2000	Pembelajaran Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	1000	Tw 1	Rp	26.000.000	Bidang Mutasi
				Tw 2	1500				Tw 2	Rp	21.000.000			
				Tw 3	1000	Pembelajaran Data Kepegawaian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 3	1000	Tw 3	Rp	14.000.000	Bidang Pembinaan
				Tw 4	500				Tw 4	Rp	7.000.000			
				Tw 1	0				Tw 1	0	Tw 1	Rp	26.000.000	
				Tw 2	60				Tw 2	60	Tw 2	Rp	19.500.000	
				Tw 3	50				Tw 3	50	Tw 3	Rp	13.000.000	
				Tw 4	50				Tw 4	50	Tw 4	Rp	6.500.000	
				Tw 1	100	Mutasi dan Promosi ASN			Tw 1	100	Tw 1	Rp	79.997.200	
				Tw 2	100	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 2	100	Tw 2	Rp	59.997.900	Bidang Mutasi
				Tw 3	100				Tw 3	Rp	39.998.600			
				Tw 4	50				Tw 4	50	Tw 4	Rp	19.999.300	
				Tw 1	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Berbas / Dokumen	Tw 1	0	Tw 1	Rp	60.000.000	Bidang Mutasi
				Tw 2	600				Tw 2	Rp	45.000.000			
				Tw 3	0				Tw 3	0	Tw 3	Rp	30.000.000	
				Tw 4	600				Tw 4	600	Tw 4	Rp	15.000.000	
				Tw 1	0	Pengelolaan Promosi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Jabatan	Tw 1	0	Tw 1	Rp	300.999.200	Bidang Mutasi
				Tw 2	0				Tw 2	Rp	225.749.400			
				Tw 3	4				Tw 3	4	Tw 3	Rp	150.499.600	
				Tw 4	0				Tw 4	0	Tw 4	Rp	75.249.800	
				Tw 1	0	Peningkatan Kompetensi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	0	Tw 1	Rp	160.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 2	5				Tw 2	Rp	120.000.000			
				Tw 3	5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 3	5	Tw 3	Rp	80.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 4	5				Tw 4	Rp	40.000.000			
				Tw 1	2	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diak Jaban	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kali	Tw 1	2	Tw 1	Rp	60.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 2	3				Tw 2	Rp	45.000.000			
				Tw 3	3				Tw 3	3	Tw 3	Rp	30.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 4	2				Tw 4	2	Tw 4	Rp	15.000.000	
				Tw 1	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diak Jaban Fungsional	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	5	Tw 1	Rp	71.968.000	Bidang Pengembangan
				Tw 2	5				Tw 2	Rp	53.976.000			
				Tw 3	5				Tw 3	5	Tw 3	Rp	35.984.000	Bidang Pengembangan
				Tw 4	5				Tw 4	5	Tw 4	Rp	17.992.000	
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah ASN yang menduduki jabatan dan telah mengukuli serta lulus DIKLA TPIM	Orang	Tw 1	0	Peningkatan Kompetensi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	0	Tw 1	Rp	160.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 2	2				Tw 2	Rp	120.000.000			
				Tw 3	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 3	4	Tw 3	Rp	80.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 4	4				Tw 4	Rp	40.000.000			
				Tw 1	50	Peningkatan Kompetensi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	50	Tw 1	Rp	60.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 2	0				Tw 2	Rp	45.000.000			
				Tw 3	0				Tw 3	0	Tw 3	Rp	30.000.000	Bidang Pengembangan
				Tw 4	0				Tw 4	0	Tw 4	Rp	15.000.000	

Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	Pensejaban Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang					Bidang Pengembangan	
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4		
			233				233						Rp 1.999.096.800		
			280				310						Rp 1.499.322.600		
			210				225						Rp 999.548.400		
			210				225						Rp 499.774.200		
													Rp 4.997.742.000		

Tanjung Redab, 17 Februari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau

HJ. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19651219-199402 2 008

Ket : Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

1	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Peningkatan data kepegawaian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	2000 1500 1000 500	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	1175 1175 1175 1175	Rp 125.250.000	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	Rp 50.100.000 37.575.000 25.050.000 12.525.000	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Informasi ASN														
																Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	40 40 40 40	Rp 33.999.632 25.499.724 16.999.816 8.499.908	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN							
																							Mutasai dan Promosi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	30 129 437 142	Rp 112.256.000 84.192.000 56.128.000 28.064.000	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Informasi ASN
	Pengelolaan Kenakatan Pangkat ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Berkas / Dokumen	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	2 2 1 0	Rp 345.744.900 230.496.600 115.248.300	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Informasi ASN																						
								Pengelolaan Promosi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Jabatan	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	0 0 1 0	Rp 111.968.000 83.976.000 55.984.000 27.992.000	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN															
															Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Peningkatan Kompetensi ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	0 4 2 0	Rp 195.991.600 146.993.700 97.995.800 48.997.900	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN								
																						Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Didat	Kali	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	3 6 4 17	Rp 92.000.000 69.000.000 46.000.000 23.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Dihat. Jabatan Fungsional	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	5 6 1 0	Rp 111.968.000 83.976.000 55.984.000 27.992.000	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN																						

						Fungsional ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Jabatan	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	#DIV/0!	Rp	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Rp	25.256.922	5,49					
									0	2	1	8			0	100,00	100,00	100,00				100,00	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN Aparatur	%	0,59	0,15	25,42		Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	0	0	0	#DIV/0!	Rp	195.991.800	Tw 1	0	0	0	Rp	0,00	0,00				
						Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 2	4	4	100,00	Rp	146.903.700	Tw 2	4	4	100,00	Rp	194.062.800	Tw 2	4	4	Rp	125,23	125,23
									Tw 3	2	3	150,00	Rp	97.992.800	Tw 3	2	3	150,00	Rp	167.731.064	Tw 3	2	3	Rp	171,16	171,16
									Tw 4	0	0	#DIV/0!	Rp	48.997.500	Tw 4	0	0	#DIV/0!	Rp	115.104.538	Tw 4	0	0	Rp	234,92	234,92
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Rak	Tw 1	3	3	100,00	Rp	92.000.000	Tw 1	3	3	100,00	Rp	30.223.040	Tw 1	3	3	Rp	32,85	32,85
									Tw 2	6	6	100,00	Rp	69.000.000	Tw 2	6	6	100,00	Rp	12.875.700	Tw 2	6	6	Rp	18,66	18,66
									Tw 3	4	4	100,00	Rp	46.000.000	Tw 3	4	4	100,00	Rp	27.695.416	Tw 3	4	4	Rp	60,21	60,21
									Tw 4	17	17	100,00	Rp	23.000.000	Tw 4	17	17	100,00	Rp	83.166.905	Tw 4	17	17	Rp	361,37	361,37
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	5	5	1,00	Rp	111.968.000	Tw 1	5	5	1,00	Rp	22.363.460	Tw 1	5	5	Rp	19,97	19,97
									Tw 2	6	6	100,00	Rp	83.976.000	Tw 2	6	6	100,00	Rp	43.768.026	Tw 2	6	6	Rp	52,12	52,12
									Tw 3	1	1	100,00	Rp	55.984.000	Tw 3	1	1	100,00	Rp	10.902.902	Tw 3	1	1	Rp	19,47	19,47
									Tw 4	8	8	100,00	Rp	27.992.000	Tw 4	8	8	100,00	Rp	47.576.831	Tw 4	8	8	Rp	169,94	169,94
						fasilitas Pengembangan Ketrampilan dalam Jabatan Fungsional	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	228.411.600	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	0,00	Tw 1	0	0	Rp	0,00	0,00
									Tw 2	0	0	#DIV/0!	Rp	171.308.700	Tw 2	0	0	#DIV/0!	Rp	0,00	Tw 2	0	0	Rp	0,00	0,00
									Tw 3	0	0	#DIV/0!	Rp	114.205.800	Tw 3	0	0	#DIV/0!	Rp	0,00	Tw 3	0	0	Rp	0,00	0,00
									Tw 4	502	532	100,00	Rp	57.102.900	Tw 4	502	532	100,00	Rp	388.352.891	Tw 4	502	532	Rp	692,60	692,60
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Orang	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	54.000.000	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	12.403.160	Tw 1	0	0	Rp	22,97	22,97
									Tw 2	30	32	106,67	Rp	40.500.000	Tw 2	30	32	106,67	Rp	69.884.000	Tw 2	30	32	Rp	172,56	172,56
									Tw 3	0	0	#DIV/0!	Rp	27.000.000	Tw 3	0	0	#DIV/0!	Rp	17.886.100	Tw 3	0	0	Rp	66,24	66,24
									Tw 4	0	0	#DIV/0!	Rp	13.500.000	Tw 4	0	0	#DIV/0!	Rp	32.096.530	Tw 4	0	0	Rp	217,09	217,09

